

## ABSTRAK

**Muisah Farhani Lubis. NIM 309321028. Peranan Abdul Haris Nasution Pada Masa Orde Lama. Skripsi Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan 2013.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Latar belakang kehidupan Abdul Haris Nasution, Untuk mengetahui peranan A.H Nasution pada masa Orde Lama, untuk menganalisa gagasan-gagasan yang di buat oleh A.H Nasution pada masa Orde Lama. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian library research (studi kepustakaan) / studi dokumen. Untuk menganalisis data maka dilakukan beberapa tahapan yaitu mengumpulkan sumber, verifikasi sumber, menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan.

Dari Hasil penelitian ini diperoleh keterangan bahwa Jenderal Abdul Haris Nasution lahir dari pasangan suami istri H. Abdul Halim Nasution dan Hj. Zaharah Lubis di Kotanopan, Mandailing Natal pada 3 Desember 1918 di desa Huta Pungkut. Nasution lahir sebagai anak kedua, dan sebagai anak laki-laki yang pertama dalam keluarganya. Di tahun 1931 Nasution meninggalkan kampungnya, karena ia naik ke kelas 7 HIS di Kotanopan, Setelah tamat dari sekolah HIS, Nasution diterima masuk sekolah guru di Bukit Tinggi, yang waktu itu dikenal dengan nama “Sekolah Raja”.

Peranan A.H.Nasution selama menjabat sebagai militer sangat terlihat jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari jabatan-jabatan yang dijabatnya serta dunia politik yang digelutinya seperti: Sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB), Menteri Keamanan Nasional, Ketua Panitia Undang-undang Pokok Kepolisian dan Kejaksaan, Ketua Panitia Retooling Aparatur Negara, Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Menteri Pertama Pertahanan/Keamanan, Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, Penasehat Agung Majelis Mahasiswa Indonesia, Wakil Ketua Pengurus Besar Pront Nasional.

A.H Nasution juga menggagas dengan Mempelopori Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Usul Nasution pada bulan Agustus 1958, di Dewan Nasional agar UUD '45 diberlakukan kembali pada mulanya tidak mendapat tanggapan yang positif dari sidang Dewan pada umumnya, akan tetapi Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit berlakunya kembali UUD '45 dengan sebuah dekrit pada 5 Juli 1959.